



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKMAWATI
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 868143

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.352.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/80 m2 di KAB / KOTA PIDIE, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 370.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 386 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.881.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 545 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **511.800.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 4X2 DAKKAR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS/MOBIL PENUMPANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SOUL GT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **5.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.378.239.257**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 5.247.339.257

III. HUTANG

Rp. 1.228.936.352

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.018.402.905

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.